

Mahulu Dapat Kucuran Rp194 M



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Jumat, 17/01/2025

- Alokasi Perbaikan Jalan Tering-Ujoh Bilang

UJOH BILANG, TRIBUN - Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur di Mahakam Ulu (Mahulu) membutuhkan proses bertahap. Dalam kunjungannya ke Ujoh Bilang, Rabu (15/1), ia menyebutkan Pemprov telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar.

"Jadi, sekali lagi kita berharap pada kapal dulu. Mudah-mudahan keberadaan dan kehadiran dari DPR RI, DPRD, dan juga Gubernur terpilih memberikan berkah," katanya kepada awak media.

JALAN BERLUMPUR - Mobil KT 1 terperosok di Jalan Tering-Ujoh Bilang yang berlumpur saat kunjungan Pj Gubernur ke Mahakam Ulu, Selasa (14/1).

Meski anggaran sudah disiapkan, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak dapat selesai dalam waktu singkat.

"Tentunya nggak bisa cepat, butuh proses. Kalau nggak tahun ini, tahun depan," tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersabar dan tetap mendukung program-program pembangunan. "Ya, berdoa saja mudah-mudahan cepat tapi kita tahu semua ini butuh waktu dan komitmen bersama," tegasnya.

Akmal juga mengumumkan rencana pembangunan jalan rigid sepanjang 8 kilometer di Kabupaten Mahulu. "Jalannya kita siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa selesailah atau paling kurang 8 kilometer ya. Kita bangun pelan-pelan dulu," ucapnya.

Pembangunan jalan ini menurutnya akan dilakukan secara bertahap. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki aksesibilitas di Mahulu yang selama ini menjadi tantangan besar bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kerja sama dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan ini. "Kita bangun pelan-pelan dulu supaya masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya secara bertahap," tuturnya.

Pembangunan jalan ini diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah strategis lainnya untuk mendorong percepatan pembangunan di Mahulu, yang selama ini terkendala oleh minimnya infrastruktur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firmanda menjelaskan Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp106 miliar untuk pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang pada tahun ini. Tidak hanya itu, pemerintah pusat melalui APBN juga menambah alokasi sebesar Rp88 miliar untuk ruas jalan yang sama.

Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan tahun depan adalah pengerasan jalan dengan produk rigid. "Untuk produknya nanti rencana rigid sehingga kualitas jalan lebih tahan lama dan dapat mendukung mobilitas masyarakat," tambah Aji saat ditemui di sela kunjungan kerja Pj Gubernur.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat turut memberikan dukungan melalui APBN. "APBN sendiri juga ada alokasi Rp88 miliar untuk yang di ruas yang sama. Ini kolaborasi yang sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Mahulu," ujarnya.

Dengan total anggaran Rp194 miliar, pembangunan jalan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala aksesibilitas yang selama ini dihadapi masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa akses jalan ini tidak hanya memadai tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan warga Mahulu." jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan yang ketat. "Kita ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat," tuturnya.

Masyarakat Mahulu kini menaruh harapan besar pada realisasi proyek ini. "Kami tahu ini tidak mudah tetapi dengan alokasi dana yang besar dan komitmen dari semua pihak, kami optimis bahwa Jalan Tering-Ujoh Bilang akan menjadi penggerak utama pembangunan Mahulu," pungkasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Mahulu Dapat Kucuran Rp194 M, 17/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
 - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan diatur sebagai berikut:
- a. Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan.
 - b. Rencana umum pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) sistem informasi;
 - 2) sistem manajemen aset; dan
 - 3) rencana penanganan pemeliharaan jalan.